

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGEREBEKAN KAMPUNG NARKOBA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN

Oleh:

Dorthy Ulini Silalahi¹⁾

Agusmidah²⁾

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2)}

E-mai:

dorthywest88.us@gmail.com ¹

midahagus@gmail.com ²

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang memberikan efek bahagia, tenang, dan rileks bagi penggunaannya. Namun, penggunaan narkoba secara berlebihan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian. Penyalahgunaan narkotika kini telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, atau pekerjaan. Di Kota Medan, terutama di kawasan yang dikenal sebagai "Kampung Narkoba," penggunaan narkoba menjadi masalah sosial serius yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggerebekan kampung narkoba oleh aparat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan peredaran narkoba. Meski mampu meningkatkan rasa aman sementara dan mengurangi aktivitas narkoba, pendekatan ini juga memiliki dampak negatif. Trauma sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta potensi kekerasan yang terjadi dalam penggerebekan kerap dialami oleh warga yang tidak terlibat langsung, termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum represif tanpa dukungan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama intensif antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba di Kota Medan.

Kata Kunci : Kampung Narkoba; Penggerebekan; Sosiologi Hukum

Abstract

Narcotics are substances derived from plants or non-plants that induce feelings of happiness, calm, and relaxation for users. However, excessive use of narcotics leads to addiction, dependency, and even death. The misuse of narcotics has spread across various social strata, disregarding age, social status, or occupation. In Medan, particularly in areas known as "Narcotics Villages," narcotics use has become a serious social issue affecting economic stability and the well-being of local communities. Law enforcement's raids on narcotics hotspots represent one method to curb the spread of narcotics. Although these raids provide a temporary sense of security and reduce narcotics activity, they also have negative impacts. Social trauma, economic instability, and potential violence from raids are frequently experienced by uninvolved residents, including children. From a socio-legal perspective, repressive law enforcement without supporting measures such as rehabilitation and community economic empowerment proves inadequate for addressing the narcotics problem sustainably.

Therefore, intensive collaboration between society and the government is necessary through a holistic approach that includes education, rehabilitation, and economic empowerment to foster a healthier, drug-free environment in Medan.

Keywords: *Narcotics Village; Raids; Socio-Legal Studies*

PENDAHULUAN

Fenomena peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Medan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berbagai wilayah, seperti Kampung Kubur, dikenal sebagai pusat peredaran narkoba yang sulit diberantas, di mana narkoba diedarkan secara terbuka dan telah meresap ke dalam tatanan sosial masyarakat (Manik & Gunawan Purba, 2024). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Medan memiliki lebih dari 6.000 kasus peredaran narkoba, dengan mayoritas kasus melibatkan narkoba jenis sabu dan ganja (Aisyah & Sahari, 2022). Penggerebekan besar-besaran yang dilakukan aparat sering kali memicu respons yang beragam dari masyarakat, baik yang positif maupun negatif.

Penggerebekan narkoba di kampung-kampung yang menjadi pusat peredaran narkoba, seperti Kampung Kubur, menjadi salah satu metode yang diandalkan aparat dalam mengurangi peredaran narkoba. Namun, pendekatan ini sering kali menyebabkan dampak sosial yang cukup signifikan, termasuk trauma pada anak-anak dan anggota keluarga yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Selain itu, penggerebekan yang berlangsung tanpa adanya program rehabilitasi dan dukungan sosial ekonomi sering kali gagal membawa perubahan jangka panjang dan justru meningkatkan resistensi masyarakat terhadap hukum (Mulkan, 2020; Revina, 2022).

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama terkait dengan penggerebekan kampung narkoba di Kota Medan. Pertama, sejauh mana penggerebekan berdampak pada struktur sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut? Kedua, bagaimana masyarakat memahami dan

merespons penegakan hukum yang dilakukan, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum? Dampak langsung dan tidak langsung dari penggerebekan ini perlu dipahami secara mendalam agar dapat diidentifikasi pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Sebelumnya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga et al. (2022) dan Nugraha (2016) berfokus pada efektivitas metode “*undercover buy*” dalam mengungkap peredaran narkoba, serta implementasi keadilan restoratif sebagai alternatif penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba (Firdaus et al., 2023). Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik mengeksplorasi dampak penggerebekan narkoba terhadap struktur sosial masyarakat di kampung-kampung peredaran narkoba serta respons masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum yang represif ini. Selain itu, belum ada penelitian yang secara mendalam menelaah perspektif sosiologi hukum dalam konteks penggerebekan narkoba di Kota Medan, khususnya terkait dampaknya pada anak-anak dan keluarga (Mudzakkir, 2008; Pratiwi et al., 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak sosial dan persepsi masyarakat terhadap penggerebekan narkoba di kampung-kampung peredaran narkoba di Kota Medan melalui pendekatan sosiologi hukum. Secara khusus, penelitian ini bertujuan, untuk: Mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi dari penggerebekan narkoba terhadap masyarakat di wilayah tersebut; Menganalisis respons masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan melalui penggerebekan kampung narkoba; dan menggali gap antara tujuan penegakan hukum dan persepsi masyarakat, serta bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat memberikan solusi alternatif.

Dengan memahami dampak penggerebekan narkoba melalui perspektif sosiologi hukum (Akbar & Hadi, 2022), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan penegakan hukum yang lebih holistik dan humanis, yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memerhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan sosial masyarakat terdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Langbroek et al., 2017), yang difokuskan pada Kampung Kubur di Kota Medan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat peredaran narkoba. Pendekatan studi kasus dipilih untuk menggali secara mendalam dampak penggerebekan narkoba terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat serta respons masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu: Wawancara Mendalam, dilakukan dengan warga setempat, aparat penegak hukum, serta mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi, untuk memahami pengalaman dan persepsi terkait penggerebekan. Observasi dilakukan pada lokasi penggerebekan (jika memungkinkan) untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan dampak fisik dari operasi penegakan hukum. Selanjutnya, menggunakan dokumen dan laporan resmi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kepolisian mengenai data peredaran narkoba di Medan, terutama yang terkait dengan Kampung Kubur (Manik & Gunawan Purba, 2024).

Data dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang memadukan analisis terhadap hukum formal dengan interaksi sosial di masyarakat (Andriani, 2022). Hasil wawancara dan observasi disusun menjadi tema-tema utama, seperti dampak sosial-ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap

penggerebekan. Tujuannya untuk menggambarkan benturan antara hukum formal dan norma sosial setempat, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Penggerebekan terhadap Masyarakat Setempat

Penggerebekan yang dilakukan di Kampung Kubur, salah satu pusat peredaran narkoba di Kota Medan, membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Reaksi warga terhadap penggerebekan ini beragam. Sebagian warga merasa bahwa tindakan tersebut memberikan rasa aman sementara dan menghargai upaya aparat dalam menekan peredaran narkoba di lingkungannya. Namun, sebagian lain merasa khawatir terhadap stabilitas ekonomi dan potensi kekerasan yang sering kali menyertai operasi semacam ini. Trauma yang ditinggalkan juga berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan kriminal, terutama karena harus menyaksikan tindakan represif aparat, yang terkadang disertai kekerasan (Basril et al., 2023; Fahlevi, 2015; Fahlevi et al., 2015; Fitriani, 2016).

Kondisi Ekonomi dan Sosial Pasca-Penggerebekan di Kampung Narkoba

Penggerebekan yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut berupa program rehabilitasi sosial dan ekonomi meninggalkan kondisi yang memprihatinkan bagi sebagian warga. Meskipun aktivitas peredaran narkoba berkurang untuk sementara waktu, hal ini juga mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Banyak warga yang terlibat dalam peredaran narkoba sebagai sumber mata pencaharian, sehingga penggerebekan menyebabkan hilangnya penghasilan bagi yang bergantung pada ekonomi ilegal ini (Patoni et al., 2023). Di sisi lain, kurangnya alternatif ekonomi dan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan beberapa warga

kembali terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba setelah situasi relatif tenang (Sanger, 2013).

Respons Aparat dan Tindakan Setelah Penggerebekan

Setelah melakukan penggerebekan, aparat kepolisian umumnya melanjutkan dengan tindakan represif tambahan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba. Namun, upaya represif ini sering kali tidak disertai dengan pendekatan rehabilitatif yang komprehensif, seperti yang disarankan oleh Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu (Febriyanto & Ablisar, 2023; Pasaribu et al., 2023). Pihak berwenang masih fokus pada hukuman pidana, tanpa memberikan perhatian pada penanganan jangka panjang yang lebih efektif melalui rehabilitasi dan dukungan sosial bagi pengguna. Hal ini mengakibatkan siklus peredaran narkoba yang terus berulang, karena tindakan represif tanpa dukungan sosial-ekonomi belum mampu mengatasi akar masalah dari peredaran narkoba di masyarakat (Sari, 2017; Siagian, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan peredaran narkoba di kampung-kampung narkoba, dengan menekankan pada integrasi pendekatan hukum represif dan rehabilitatif (Chouliaras, 2014; Hatta, 2010; Julyano & Sulistyawan, 2019). Benturan antara hukum formal dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk dapat mengatasi masalah narkoba secara efektif di wilayah-wilayah yang rentan seperti Kampung Kubur di Kota Medan.

Analisis Sosiologi Hukum

Benturan antara Hukum Formal (Penegakan Hukum) dan Norma Sosial Lokal

Penggerebekan narkoba yang dilakukan di Kampung Kubur memperlihatkan adanya benturan yang signifikan antara hukum formal (aturan hukum negara) dan norma sosial lokal. Dalam sosiologi hukum, ini

sering disebut sebagai konflik antara “hukum negara” dan “hukum rakyat” atau norma informal yang sudah melekat dalam komunitas (Setyadi & Wibowo, 2022). Bagi masyarakat Kampung Kubur, peredaran narkoba sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Keterlibatan sebagian warga dalam jaringan narkoba bukan hanya karena alasan kriminal, tetapi juga faktor ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan. Norma sosial di lingkungan tersebut cenderung mentoleransi, atau bahkan mendukung, peredaran narkoba sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang sulit (Shalihah, 2017; Umanailo, 2017).

Ketika aparat melakukan penggerebekan, hukum formal yang diterapkan bertujuan menegakkan ketertiban dan mengurangi peredaran narkoba. Namun, tindakan ini sering kali dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi lokal oleh warga setempat, yang kemudian menciptakan ketegangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, benturan ini menggambarkan ketidakharmonisan antara peraturan negara dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh norma lokal yang permisif terhadap narkoba.

Dampak terhadap Persepsi Masyarakat tentang Keadilan dan Kesadaran Hukum

Persepsi masyarakat tentang keadilan sangat terpengaruh oleh pendekatan yang digunakan aparat dalam penggerebekan. Banyak warga merasa bahwa penggerebekan yang dilakukan secara mendadak dan represif, tanpa adanya dialog atau sosialisasi terlebih dahulu, menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat melihat tindakan aparat sebagai bentuk kekerasan yang tidak menghargai masyarakat sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa penegakan hukum hanya bersifat menghukum, tanpa memerhatikan solusi yang lebih holistik bagi perbaikan ekonomi masyarakat (Patoni et al., 2023; Revina, 2022).

Kesadaran hukum masyarakat di kampung narkoba ini pun menjadi rendah, karena hukum dianggap sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh pihak berwenang tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung skeptis terhadap hukum, karena penegakan hukum yang dilakukan justru mengabaikan kebutuhan dasar terhadap ekonomi dan keamanan. Hal ini berakibat pada rendahnya dukungan warga terhadap tindakan hukum formal dan memicu resistensi terhadap intervensi aparat (Pratiwi et al., 2022; Pratiwi Pramesti, 2023).

Dampak Sosial pada Anak-anak dan Keluarga yang Tidak Terlibat Langsung

Dampak sosial dari penggerebekan ini sangat dirasakan oleh anak-anak dan anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas peredaran narkoba. Anak-anak di Kampung Kubur yang menyaksikan penggerebekan sering kali mengalami trauma psikologis akibat kekerasan yang terjadi (Ablisar & Mulyadi, 2021; Budoyo, Sapto; Sari, 2019; Nababan, 2008; Purwanti & Zaliani, 2018). Anak-anak mengalami ketakutan dan ketidakpastian, yang dapat berdampak pada perkembangan mental dan emosionalnya (Abas et al., 2022). Dalam perspektif sosiologi hukum, dampak ini menunjukkan bahwa hukum formal yang diterapkan tidak hanya memengaruhi pelaku kriminal, tetapi juga berdampak pada individu-individu yang seharusnya terlindungi oleh hukum. Anggota keluarga lain yang tidak terlibat juga menghadapi stigma sosial dari masyarakat sekitar dan kerugian ekonomi yang mendalam. Kehilangan mata pencaharian, rasa takut, dan stigma sosial menempatkan keluarga-keluarga ini dalam situasi yang rentan dan sulit. Penegakan hukum yang tidak memerhatikan efek samping bagi masyarakat secara keseluruhan cenderung gagal mencapai tujuan rehabilitatif atau preventif, dan hanya menghasilkan dampak jangka pendek yang berpotensi memicu resistensi

dan ketidakpercayaan terhadap hukum (Hasanah, 2023; Suyono et al., 2021).

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan yang timbul dari benturan antara hukum formal dan norma sosial lokal (Akbar & Hadi, 2022; Arief, 2020). Pendekatan yang lebih humanis, melalui integrasi penegakan hukum dengan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi, diperlukan untuk mencapai solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat di kampung-kampung narkoba seperti Kampung Kubur.

Perspektif Positif dan Negatif

Sisi Positif Penggerebekan

Penggerebekan kampung narkoba seperti di Kampung Kubur memiliki beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat. Pertama, penggerebekan ini memberikan peningkatan rasa aman, meskipun hanya sementara, bagi warga yang merasa terganggu dengan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan tersebut. Warga yang tidak terlibat dalam kegiatan narkoba menyambut baik tindakan ini, sebab mengurangi potensi bahaya di lingkungan setempat. Warga tersebut berharap bahwa dengan adanya tindakan tegas dari aparat, lingkungan tersebut dapat menjadi lebih kondusif dan bebas dari kegiatan yang merusak (Revina, 2022).

Selain itu, penggerebekan berhasil menurunkan aktivitas peredaran narkoba dalam jangka pendek. Para pengedar dan pengguna narkoba menjadi waspada atau bahkan menghentikan kegiatan masyarakat sementara waktu, yang pada akhirnya mengurangi angka peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dalam konteks sosiologi hukum, tindakan penegakan hukum yang represif ini juga menunjukkan otoritas negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi warga dari dampak negatif narkoba (Patoni et al., 2023).

Sisi Negatif Penggerebekan

Namun, penggerebekan kampung narkoba juga membawa sejumlah dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Sisi

negatif utama dari penggerebekan ini adalah trauma sosial yang dialami oleh warga, terutama anak-anak dan anggota keluarga yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan atau melihat anggota keluarganya ditangkap sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak dalam jangka panjang (Abas et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan dengan pendekatan kekerasan dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius bagi masyarakat, yang dalam jangka panjang justru mengurangi rasa aman dan kepercayaannya terhadap hukum (Siagian, 2022).

Selain dampak psikologis, potensi kekerasan yang muncul selama penggerebekan juga menjadi masalah besar. Penggerebekan yang dilakukan secara mendadak dan dalam skala besar sering kali melibatkan tindakan represif yang keras dari pihak aparat. Warga yang tidak terkait langsung, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi saksi kekerasan, yang bisa menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman. Tindakan yang dilakukan dengan keras dan tanpa pandang bulu ini, di mata masyarakat, memperkuat pandangan bahwa hukum dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa rasa kemanusiaan (Patoni et al., 2023; Pratiwi et al., 2022).

Dari sudut pandang ekonomi, penggerebekan juga menciptakan ketidakstabilan jangka panjang bagi masyarakat setempat. Kampung narkoba seperti Kampung Kubur sangat tergantung pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan peredaran narkoba. Bagi sebagian warga, keterlibatan dalam jaringan narkoba menjadi sumber mata pencaharian utama karena minimnya kesempatan kerja dan pilihan ekonomi yang tersedia. Penggerebekan yang menyebabkan penghentian aktivitas peredaran narkoba tanpa menyediakan alternatif pekerjaan lain menyebabkan banyak warga kehilangan mata pencaharian, yang pada akhirnya

meningkatkan ketidakstabilan ekonomi di wilayah tersebut (Abas et al., 2022). Ketidakstabilan ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi, dan tanpa adanya solusi yang berkelanjutan, beberapa warga kemungkinan akan kembali terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai upaya bertahan hidup.

Analisis perspektif positif dan negatif ini menunjukkan bahwa, meskipun penggerebekan kampung narkoba dapat memberikan dampak positif berupa pengurangan aktivitas narkoba, tindakan represif tanpa strategi rehabilitatif dan pemberdayaan ekonomi justru meninggalkan dampak sosial-ekonomi dan psikologis yang signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan peredaran narkoba, dengan menyeimbangkan tindakan hukum dengan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penggerebekan kampung narkoba di Kota Medan, khususnya di Kampung Kubur, memiliki dampak kompleks pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Meski penggerebekan meningkatkan rasa aman sementara dan menekan aktivitas narkoba, efek negatif seperti trauma sosial, potensi kekerasan, dan ketidakstabilan ekonomi tetap signifikan. Konflik antara hukum formal dan norma sosial lokal menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup mengatasi masalah ini. Pendekatan holistik yang mencakup rehabilitasi, edukasi tentang bahaya narkoba, dan pemberdayaan ekonomi untuk menyediakan pekerjaan yang legal bagi warga, sangat urgen untuk dilaksanakan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang penggerebekan, meningkatkan kesadaran hukum, dan menilai efektivitas program rehabilitasi serta pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *PILAR: Philosophia Law Review*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.5659/1/pilar.v2il.14127>
- Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2021). *PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU (STUDI PADA POLRES LANGKAT): Vol. II* (Issue 1).
- Aisyah, & Sahari, A. (2022). Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan). *Jurnal Doktrin Review: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1), 152–162.
- Akbar, N., & Hadi, K. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Arief, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *MODERASI: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Basril, F., Andi, M., & Lubis, S. A. (2023). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023*.
- Budoyo, Sapto; Sari, R. K. (2019). Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 79–90.
- Chouliaras, A. (2014). Bridging the Gap between Criminological Theory and Penal Theory within the International Criminal Justice System. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 22(3), 249–279. <https://doi.org/10.1163/15718174-22032049>
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. In *Lex Jurnalica (Journal of Law)* (Vol. 12, p. 3). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>
- Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. In *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica* (Vol. 12).
- Febriyanto, H., & Ablisar, M. (2023). Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.164>
- Firdaus, M., Dwilaksana, C., & Onielda, M. D. A. (2023). Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>
- Fitriani, R. (2016). PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
- Hasanah, T. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TEBING TINGGI (Studi Di Polres Tebing Tinggi)*. Universitas Medan Area.
- Hatta, Moh. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam*

- Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Langbroek, P., van den Bos, K., Thomas, M. S., Milo, M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. In *Utrecht Law Review* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1–8). Igitur, Utrecht Publishing and Archiving Services. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>
- Manik, I., & Gunawan Purba, I. (2024). PENEGAKAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PENGEDAR DAN PEMAKAI NARKOTIKA JENIS SHABU SHABU DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan). In *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 6, Issue 1).
- Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*.
- Mulkan, H. (2020). Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana. *Doctrinal*, 5(1). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2516>
- Nababan, B. S. P. (2008). *Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12177/1/09E02076.pdf>
- Nugraha, D. C. (2016). PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak). *JURNAL PSMH UNTAN*, 12(3). <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/puslitdatin/artikel/10682/remaja-dan-penyalahgunaan->
- Pasaribu, F. V., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2023). Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.190>
- Patoni, P., Abdul Gani, R., & Rasito, R. (2023). RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN SENYERANG TANJUNG JABUNG BARAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1545–1564. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.846>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Pratiwi Pramesti, Y. (2023). Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 5(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>
- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

- Revina, V. (2022). REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENUJU ZERO PREVALENSI (Studi Pada Badan Narkotika National Provinsi Lampung). *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 187.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8980>
- Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. In *Lex Crimen* (Vol. 2, Issue 4, pp. 5–13).
- Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 351.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363>
- Setyadi, Y., & Wibowo, W. (2022). TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS NUSAKAMBANGAN). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(2).
- Shalihah, F. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM* (Vol. 1). Rajawali Pers. www.rajagrafindo.co.id
- Siagian, M. Nathanael. (2022). *Penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia : studi perkara tindak pidana narkotika golongan 1 tahun 2016-2020 (pasal 111-116 dan pasal 127 UU Narkotika 35 tahun 2009)*. Diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF).
- Suyono, H. M., Ekaputra, M., & Marlina, D. (2021). *PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAAN TERHADAP ANAK DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan): Vol. II*.
- Umanailo, M. C. B. (2017). *Sosiologi Hukum*.
- <https://doi.org/10.31219/osf.io/5ymwh>